

PERBANDINGAN KEBIJAKAN INVASI MILITER INGGRIS STUDI KASUS: MESIR (1956) DAN IRAK (2003)

Nasywa Ulfah Roesmanto

20150510243

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

nasywa.ulfah.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

In 1956 Britain invaded Egypt to take back the Suez Canal as a result of the canal nationalization by Egyptian Government in the same year as well as to overthrow Egyptian leader, Gamal Abdel Nasser. In 2003 Britain invaded Iraq to overthrow Iraqi Leader, Saddam Hussein disarm Iraq from the weapon of mass destruction and free the Iraqis from Hussein's authoritarian regime. Both actions have similarities i.e. both countries are Middle Eastern whose leaders seemed to threatened Britain's national interests as well as the West's. Moreover, the two foreign policies also faced a strong backlash from public in Britain. However, during the invasion in Egypt, Britain failed to accomplish the purpose of the invasion but succeeded to Iraq. This article analyzed the factors of which could possibly influenced Britain's failure and success during the invasion. Comparisons of the two foreign policies are discussed.

Keywords: *foreign policy, Britain, Egypt, Iraq, military intervention.*

Pada tahun 1956, Inggris melaksanakan invasi militer ke Mesir dengan tujuan untuk mengambil alih kembali Terusan Suez yang telah dinasionalisasikan Mesir dan menjatuhkan pemimpin Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser dari jabatannya. Kemudian pada tahun 2003, Inggris melakukan invasi militer ke Irak dengan tujuan untuk menjatuhkan pemimpin Irak saat itu, Saddam Hussein, melucuti senjata pemusnah massal di Irak serta membebaskan Irak dari rezim Hussein yang otoriter. Kedua kebijakan invasi militer ini memiliki kesamaan yaitu: Inggris sama-sama melakukan invasi militer ke Timur Tengah yang salah satu tujuannya adalah untuk

menjatuhkan pemimpin yang saat itu sedang berkuasa dari jabatannya karena dianggap membahayakan kepentingan Inggris serta barat. Kedua kebijakan ini juga mendapatkan perlawanan yang kuat dari publik Inggris. Sayangnya pada saat invasi ke Mesir, Inggris gagal mencapai tujuan invasi yang ditetapkan dan berhasil saat invasinya ke Irak.

INVASI MILITER INGGRIS KE MESIR TAHUN 1956

Pada bulan Juli tahun 1956, Gamal Abdel Nasser mengumumkan nasionalisasi Suez Canal Company sekaligus Terusan Suez oleh Mesir sebagai respon terhadap ditariknya bantuan keuangan oleh Amerika Serikat dan Inggris untuk proyek Bendungan Aswan di Mesir. Amerika Serikat dan Inggris menarik bantuan keuangan tersebut sebagai respon terhadap semakin dekatnya hubungan Mesir dengan Uni Soviet dan Cekoslovakia.

Nasionalisasi Terusan Suez ini melambangkan bebasnya Mesir dari pengaruh imperialis Inggris (Ashton, 1996). Bagi pemerintah Inggris, tindakan Nasser ini menggambarkan sesuatu yang lebih berbahaya. Pemerintah Inggris memandang Nasser sebagai ancaman bagi kepentingan mereka di Timur Tengah, aliran minyak ke Eropa dan kepada para pemimpin di negara-negara Timur Tengah yang masih pro-Barat (Suter, 2004). Nasser yang saat itu disamakan dengan Hitler dan Mussolini telah mengambil alih sebuah hal yang sangat penting bagi Inggris dan jika tindakannya ini tidak dihentikan maka krisis ekonomi dan berkurangnya pengaruh politik akan mengancam Inggris (Ashton, 1996).

Pemerintahan Inggris dibawah Anthony Eden memutuskan untuk membentuk kabinet perang guna menyelesaikan ini yang dinamai *The Egypt Committee* (EC) dan beranggotakan menteri-menteri senior di dalam kabinet Eden. Yurisdiksi *The Egypt Committee* ini meliputi upaya militer serta negosiasi diplomatik (didorong oleh Amerika Serikat) untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Nasionalisasi Terusan Suez (Seymour-Ure, 1984).

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Inggris melakukan beberapa upaya diplomasi yang sayangnya tidak membuahkan hasil. Hal ini kemudian mengakibatkan pemerintah Inggris mulai mendapatkan tekanan dari banyak pihak. Partai Konservatif mendorong Eden untuk mengambil tindakan tegas dan Partai Buruh yang awalnya mendukung upaya diplomasi mulai terlihat tidak sabar karena upaya diplomasi yang dilakukan tidak ada yang membuahkan hasil (Ashton, 1996).

Disinilah Pemerintah Perancis kemudian menawarkan solusi. Perancis saat itu khawatir tidak hanya oleh keputusan Nasser untuk nasionalisasikan Terusan Suez tapi juga oleh tindakan Nasser yang mendukung pemberontak di Aljazair untuk melawan imperialisme Perancis (Ashton, 1996). Pemerintah Perancis kemudian juga menginformasikan bahwa Pemerintah Israel juga memiliki kepentingan yang sama.

Ketiga pihak kemudian bertemu secara rahasia di Sèvres, Perancis. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan *Protocol of Sèvres* yang isinya adalah, Israel akan melakukan invasi militer terlebih dahulu ke Mesir yang kemudian hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi pemerintah Inggris dan Perancis mengeluarkan ultimatum untuk kedua belah pihak dan jika ultimatum tersebut nantinya ditolak, maka Inggris dan Perancis kemudian bisa melakukan invasi militer ke Mesir. Pada tanggal 29 Oktober 1956, Israel memulai invasi militernya ke Mesir kemudian disusul oleh Inggris dan Perancis pada tanggal 5 November 1956.

Sayangnya pada saat invasinya ini, Inggris mendapatkan banyak tekanan baik dari dalam maupun luar negeri. Besarnya tekanan yang datang kepada pemerintah inilah yang kemudian menyebabkan Inggris terpaksa untuk menarik mundur pasukannya tanpa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

INVASI MILITER INGGRIS KE IRAK TAHUN 2003

Peristiwa 11 September 2001, yang terdiri dari pembajakan pesawat penumpang dan serangkaian serangan bunuh diri, merupakan tragedi terorisme paling

besar yang terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa ini mengubah pola pikir dunia tentang terorisme dan radikalisme. Negara-negara yang melindungi dan menolong teroris adalah musuh potensial dan sebuah tindakan haruslah diambil demi keamanan internasional. Peristiwa 9/11 kemudian membawa hubungan antara Blair dan Bush menjadi semakin dekat, bahkan lebih dekat jika dibandingkan dengan hubungan Blair dan Clinton (Sharp, 2004). Blair memahami dampak peristiwa 9/11 kepada pola pikir orang-orang Amerika dan memiliki pandangan yang sama dengan Bush mengenai pentingnya meredakan ancaman dari Islam fundamentalis dengan cara menerapkan demokrasi di seluruh Timur Tengah (Sharp, 2004). Pasca peristiwa 9/11, Tony Blair juga menekankan adanya hubungan antara senjata pemusnah massal dan ancaman terorisme (Kennedy-Pipe & Vickers, 2007).

Tony Blair menganggap bahwa Irak merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk mengancam keamanan Inggris dan keamanan internasional. Menurut Blair, Irak akan menjadi negara yang lebih baik jika Saddam Hussein tidak lagi duduk di kursi kekuasaan (Blair, 2010). Dalam bukunya, Blair memaparkan bahwa banyaknya konflik yang memakan korban jiwa, seperti Perang Iran-Irak dan Perang Teluk, selama masa pemerintahan Hussein sebagai alasan mengapa Saddam Hussein tidak bisa dibiarkan untuk memimpin Irak. Pemerintahan Saddam Hussein, secara internal, merupakan sumber kebrutalan dan penindasan; dan secara eksternal, penyebab ketidakstabilan dan konflik (Blair, 2010). Selain itu, Saddam Hussein yang saat itu menolak untuk bekerja sama dengan PBB dalam hal perlucutan senjata juga menjadi dasar lahirnya klaim bahwa Irak memang sedang mengembangkan senjata pemusnah massal dan bekerjasama dan membantu kelompok teroris Al-Qaeda, yang merupakan pelaku serangan 9/11 di Amerika Serikat. Fakta ini memberikan dasar yang jelas untuk menilai bahwa Hussein memang merupakan ancaman dan melanggar resolusi PBB (Blair, 2010).

Blair menguraikan tiga alasan utama perlunya intervensi ke Irak kepada publik. Yang pertama, ancaman dari kepemilikan dan tekad Saddam Hussein untuk

mengembangkan senjata pemusnah massal. Kedua, adanya dugaan hubungan antara Saddam Hussein dengan kelompok teroris internasional, khususnya Al-Qaeda. Ketiga, adanya keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia di Irak dibawah rezim Saddam Hussein. Bagi Blair, semua alasan diatas berarti bahwa Irak bukan saja merupakan ancaman keamanan baik secara regional maupun internasional, tetapi juga merupakan ancaman keamanan bagi rakyatnya sendiri (Kennedy-Pipe & Vickers, 2007).

Invasi militer tersebut kemudian dimulai pada tanggal 20 Maret 2003. Negara-negara yang berpartisipasi diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Polandia. Invasi militer ini berhasil menjatuhkan rezim Saddam Hussein dan membuatnya melarikan diri ke luar Bagdad. Saddam Hussein kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003 dan dieksekusi mati tiga tahun kemudian.

TEORI *DECISION MAKING PROCESS* OLEH WILLIAM D. COPLIN

Untuk membandingkan kedua kebijakan invasi militer Inggris diatas, digunakan teori *decision making process* oleh William D. Coplin. Menurut Coplin, tindakan politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Pertimbangan yang pertama adalah, kondisi politik dalam negeri; kedua, kondisi ekonomi dan militer di negara tersebut dan ketiga, konteks internasional, yakni situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (Coplin & Marbun, 1992). Ketiga pertimbangan ini kemudian digunakan sebagai indikator pembanding kedua kebijakan diatas serta indikator untuk menganalisis bagaimana hubungan ketiga pertimbangan tersebut dengan (1) gagalnya Inggris untuk mencapai tujuan dilakukannya invasi militer ke Mesir serta (2) berhasilnya Inggris untuk mencapai tujuan dilakukannya invasi militer ke Irak.

Kondisi politik dalam negeri

Invasi Inggris ke Mesir tahun 1956

Keputusan pemerintah Inggris untuk menginvasi Mesir ini mendapatkan perlawanan yang kuat dari kubu oposisi di parlemen. Hugh Gaitskell, ketua kubu oposisi, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan sebuah kebodohan dan konsekuensinya harus ditanggung dan disesali selama bertahun-tahun kedepan. Kritik Gaitskell ini didasarkan pada alasan bahwa Inggris dan Perancis harusnya tidak bertindak secara independen ketika masalah Israel dan Mesir sedang dirujuk kepada Dewan Keamanan PBB, tidak ada kebenaran hukum bagi pemerintah Inggris untuk melakukan hal tersebut dan tidak ada konsultasi yang cukup dengan Amerika Serikat dan negara-negara Persemakmuran (Mahmood, 1962).

Perdebatan di parlemen semakin memanas ketika pada hari berikutnya, pasukan Inggris dan Perancis mulai menjatuhkan bom ke lapangan udara militer Mesir. Dalam pidatonya pada hari itu, Gaitskell mengatakan bahwa keputusan pemerintah ini telah mengabaikan tiga prinsip yang telah mengatur kebijakan luar negeri Inggris selama sepuluh tahun terakhir, yaitu solidaritas dengan negara-negara Persemakmuran, aliansi Anglo-Amerika dan kepatuhan kepada piagam PBB. Gaitskell kemudian melanjutkan pidatonya ini dengan menyatakan bahwa kubunya tidak akan mendukung keputusan pemerintah ini. Seperti yang dikutip dari pidatonya:

“Saya harus menyatakan kepada Pemerintah dan negara bahwa kami tidak dapat mendukung tindakan yang telah diambil dan kami merasa terikat oleh konstitusi yang ada untuk menentangnya.” (Gaitskell, 1956)

Partai Buruh kemudian berkomitmen untuk menjalankan kampanye nasional melawan keputusan pemerintah (Mahmood, 1962). Tema dari kampanye tersebut adalah “*Law, Not War*”. Melalui kampanye ini kelompok oposisi mencoba untuk menggalang opini publik untuk mengurangi popularitas pemerintah. Opini publik terbukti berhasil digerakkan untuk melawan kebijakan pemerintah karena banyaknya jumlah petisi dan telegram yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Eden oleh

publik terkait dengan kebijakan invasi militernya. Hal paling menonjol dari perlawanan oposisi ini adalah digelarnya demonstrasi di Trafalgar Square yang dihadiri oleh hampir 30.000 demonstran untuk menuntut pemerintah Inggris agar mengentikan invasi militernya ke Mesir.

Selama invasi militer berlangsung, beberapa pejabat pemerintahan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan invasi militer pemerintah. Seperti misalnya Anthony Nutting, sebagai Menteri Negara untuk urusan luar negeri dan juga Sir Edward Boyle sebagai Menteri Ekonomi di Kementerian Keuangan. Tak lama kemudian beberapa menteri di dalam kabinet Anthony Eden juga mulai menentang keputusan invasi militer ini. Salah satunya adalah Harold Macmillan, sebagai Kanselir Perbendaharaan, yang melihat adanya potensi krisis ekonomi di Inggris karena nilai poundsterling yang turun terus menerus semenjak invasi militer dilakukan. Menurut Macmillan, invasi militer harus dihentikan jika Inggris tidak mau menerima tekanan keuangan dan ekonomi dari luar negeri. Macmillan kemudian menyampaikan kepada kabinet bahwa dirinya tidak bias terus menjabat sebagai Kanselir Perbendaharaan jika invasi militer tidak kunjung dihentikan. Menteri-Menteri senior di kabinet Eden seperti R.A Butler dan Selwyn Lloyd yang awalnya setuju dengan keputusan pemerintah akhirnya menyetujui pandangan Macmillan dan menyarankan agar invasi militer tersebut dihentikan (Pearson, 2003).

Hal tersebut bersamaan dengan kampanye kubu oposisi yang berhasil menggerakkan opini publik untuk menentang kebijakan pemerintah serta tekanan yang datang dari luar negeri kemudian menjadi pertimbangan bagi Perdana Menteri Eden yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan invasi Inggris ke Mesir dan menyebabkan gagalnya Inggris untuk mencapai tujuan awal yang ditetapkan dari invasi tersebut.

Invasi Inggris ke Irak tahun 2003

Opini publik di Inggris selama krisis Irak menunjukkan bahwa publik akan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengerahkan militer dalam mengatasi konflik dengan Irak jika disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam survey yang dilakukan oleh Ipsos MORI pada September 2002, 71% warga Inggris setuju pada keputusan pemerintah jika Dewan Keamanan PBB juga setuju dan 61% juga berpendapat sama dalam survey yang diadakan pada bulan Januari 2003 (MORI, Possible War with Iraq - the Public View, 2002). Selanjutnya dalam survey lain yang diadakan di awal bulan Maret 2003, menunjukkan hasil bahwa 75% responden mendukung invasi militer ke Irak jika ditemukan bukti bahwa Irak benar-benar memiliki senjata pemusnah massal dan ada persetujuan dari PBB (MORI, War with Iraq, 2003). Jika tidak ada bukti dan persetujuan dari PBB, 27% responden tetap mendukung invasi tersebut (MORI, War with Iraq, 2003). Survey terakhir yang dilakukan pada bulan Maret 2003 sebelum invasi militer dilaksanakan menunjukkan hasil bahwa 48% responden mendukung invasi militer tersebut jika ditemukan bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan ada persetujuan dari PBB (MORI, Iraq, The Last Pre-War Polls, 2003).

Publik Inggris bersikap skeptis terhadap kebijakan luar negeri pemerintah dan Perdana Menteri Blair. Karakteristik umum opini publik di Inggris menunjukkan bahwa publik Inggris memahami perlunya campur tangan terhadap sebuah rezim dan penggunaan kekuatan militer dalam situasi tertentu, namun, terlepas dari itu, publik masih meminta bukti lebih lanjut apakah penggunaan kekuatan militer benar-benar diperlukan seperti, apakah benar Irak memiliki senjata pemusnah massal atau melalui persetujuan dari PBB (Stuchlik, 2004). Publik Inggris juga sempat menunjukkan oposisinya dengan menggelar demonstrasi bertepatan “Stop the War” yang dihadiri oleh 1 juta demonstran dan membuat demonstrasi ini sebagai demonstrasi terbesar di Inggris.

Dari segi elit politik, Perdana Menteri Blair menghadapi perlawanan dari tujuh menteri dalam kabinetnya yang tidak setuju dengan kebijakan yang hendak

diambilnya. Perlawanan juga datang dari anggota partainya sendiri yaitu Partai Buruh. Berada di bawah tekanan yang besar dan adanya tekanan untuk mengundurkan diri dari oposisi, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan voting di *House of Commons*. Jika hasil dari voting ini dimenangkan oleh kelompok oposisi yang tidak setuju dengan kebijakannya, Perdana Menteri Blair dan menteri-menteri lain yang mendukung kebijakan invasi militer berjanji untuk mengundurkan diri dari jabatan masing-masing. Hasil voting kemudian berhasil dimenangkan oleh pemerintah dengan mayoritas 412 suara mendukung invasi militer dan 149 suara tidak mendukung. Dengan demikian pemerintah tidak akan mengundurkan diri dan invasi militer tetap dilaksanakan satu hari setelah voting tadi diadakan. Voting ini mengamankan posisi pemerintah dari menurunnya kepercayaan dari publik serta tekanan-tekanan yang berasal dari kelompok oposisi.

Kondisi ekonomi dan militer

Kondisi ekonomi

Invasi Inggris ke Mesir tahun 1956

Ekonomi Inggris pada tahun 1950an dikategorikan sebagai ekonomi pasca perang, dimana didalamnya terdapat pinjaman dana pasca perang, penghematan pengeluaran anggaran dan standar hidup masyarakat yang kian meningkat (Pettinger, 2016). Pada tahun 1956, GDP Inggris adalah sebesar 114,5 milyar poundsterling pada kuartal pertama, 114,3 milyar poundsterling pada kuartal kedua, 114,1 milyar poundsterling pada kuartal ketiga, 114,6 milyar poundsterling pada kuartal keempat (National Statistic & Richards, 2018). Pertumbuhan GDP Inggris pada tahun 1956 menurun jika dibandingkan dengan tahun 1955. Pada tahun 1955, angka pertumbuhan GDP di Inggris mencapai angka 3,8% dan hanya sebesar 1,6% di tahun 1956 (National Statistic & Richards, 2018). Hal tersebut mencerminkan penurunan kondisi ekonomi Inggris pada tahun 1956 sehingga menyebabkan Inggris rawan terhadap krisis ekonomi.

Ciri khas lain dari ekonomi Inggris pada tahun 1950an adalah tarif pajak yang sangat tinggi. Perang Dunia II menciptakan iklim politik yang mentolelir tarif pajak penghasilan yang tinggi (Pettinger, 2017). Selain itu, Inggris memiliki rasio hutang negara yang sangat tinggi pasca Perang Dunia II yaitu sebesar lebih dari 230% pada akhir tahun 1940an dan pada tahun 1956, rasio hutang negara terhadap pendapatan hampir mencapai angka 150% (Pettinger, 2017).

Pada abad ke-20, industri dan perekonomian Inggris beralih dari yang awalnya berbasis batu bara menjadi berbasis minyak bumi. Pemulihan ekonomi Inggris pasca Perang Dunia II membutuhkan banyak sekali minyak bumi dengan harga terjangkau (Varble, 2003). Tanpa sumber daya strategis ini, status Inggris sebagai negara dengan kekuatan besar mungkin akan berakhir (Varble, 2003). Oleh karenanya, Terusan Suez merupakan hal yang vital bagi perekonomian Inggris karena bisa mempercepat pengiriman minyak bumi ke Inggris. Ketergantungan ekonomi Inggris pada Terusan Suez inilah yang kemudian menyebabkan Inggris berani untuk mengambil tindakan seperti melakukan invasi militer untuk merebut kembali Terusan Suez dari Mesir dan mengamankan kelangsungan perekonomian di negaranya.

Sejak invasi militer ke Mesir diluncurkan oleh pemerintah Inggris, nilai tukar poundsterling mengalami penurunan yang drastis dikarenakan Amerika Serikat menjual semua poundsterling yang dimilikinya sebagai bentuk protes atas kebijakan luar negeri Inggris. Hal ini memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Inggris yang saat itu sedang tidak stabil akibat tingginya rasio hutang luar negeri serta penurunan GDP dari tahun sebelumnya. Cadangan mata uang juga sudah berkurang sejak awal November (Varble, 2003) dan Inggris memerlukan pinjaman dana ke IMF. Pinjaman tersebut tidak bisa didapatkan jika Inggris tidak menghentikan invasi militernya ke Mesir. Inggris kemudian setuju untuk menghentikan invasinya ke Mesir dikarenakan dirinya membutuhkan bantuan keuangan dari IMF dan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang semakin terlihat jelas.

Invasi Inggris ke Irak tahun 2003

Komisi Eropa dalam publikasinya yang berjudul *European Economy* menyatakan bahwa ekonomi Inggris pada tahun 2003 berhasil melalui atau dapat bertahan dari ekonomi global yang sedang melambat. Statistik terbaru yang dikeluarkan oleh ONS (The Office of National Statistic) mengindikasikan bahwa pertumbuhan GDP Inggris baru-baru ini lebih seimbang daripada yang diperkirakan sebelumnya, dengan konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang lebih sedikit dan investasi dan ekspor perusahaan yang lebih baik (Commision, 2003).

Pertumbuhan GDP Inggris pada tahun 2003 adalah sebesar 3,3% (National Statistic & Richards, 2018). GDP tumbuh sebesar 399,2 milyar poundsterling pada kuartal pertama tahun 2003, 403 milyar poundsterling pada kuartal kedua, 407,1 milyar pounsterling pada kuartal ketiga dan 410,3 milyar poundsterling pada kuartal keempat (National Statistic & Richards, 2018). Angka pengangguran adalah sebesar 5,1% dan tingkat inflasi adalah sebesar 1.9% dan diprediksi akan tetap di angka tersebut hingga akhir 2003 (Commision, 2003).

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintahan Tony Blair menuai kesuksesan besar. Inggris mencapai pertumbuhan ekonomi, kestabilan nilai mata uang, rendahnya tingkat pengangguran dan lebih unggul dari negara-negara Eropa lainnya (Kramer, 2003). Lain dengan kasus invasi Inggris ke Mesir tahun 1956, pada saat invasi Inggris ke Irak tahun 2003, Inggris tidak mendapatkan ancaman atau tekanan ekonomi dari dunia internasional. Kondisi ekonomi yang stabil juga membuat Inggris terhindar dari krisis.

Kondisi militer

Invasi Inggris ke Mesir tahun 1956

Inggris memulai persiapan pasukan militernya sejak bulan Juli 1956. Namun saat itu Inggris kesulitan untuk mengumpulkan jumlah pasukan yang diinginkan

dikarenakan komitmen Perang Dingin yang mengharuskan Inggris menempatkan pasukan militer di Eropa, Atlantik Utara dan Korea (Sanders, 1989). Pasukan Inggris mengalami keterbatasan peralatan dan kurangnya pelatihan militer. Kekuatan angkatan laut Inggris juga terbukti kurang pada tahun 1956.

Inggris saat itu membangun aliansi dengan Perancis dan menerjunkan sebanyak 45.000 pasukan dan Perancis sebanyak 34.000 pasukan. Aliansi ini terbukti kurang kuat dikarenakan Inggris dan Perancis hanya bisa menduduki sebagian kecil wilayah Mesir yang berada di sekitar Terusan Suez tanpa berhasil mengambil alih Terusan Suez seperti yang direncanakan sebelumnya hingga akhirnya invasi tersebut harus dihentikan dikarenakan besarnya tekanan yang datang dari dalam dan luar negeri kepada pemerintah Inggris.

Invasi Inggris ke Irak tahun 2003

Inggris memiliki jumlah personel yang mencukupi untuk melakukan invasi militer ke Irak. Inggris saat itu tidak memiliki komitmen untuk menempatkan pasukannya di wilayah tertentu seperti yang terjadi pada saat invasi ke Mesir tahun 1956. Inggris juga membangun aliansi yang kuat dengan Amerika Serikat yang membawa sebanyak lebih dari 400 ribu personel dalam invasinya ke Irak. Australia yang juga merupakan bagian dari aliansi ini mengirimkan sebanyak 2.000 personel. Aliansi ini sangat kuat, terbukti dari berhasil ditaklukkannya Irak dalam waktu 2 bulan. Ini juga menandai berhasil tercapainya tujuan awal yang diinginkan dari invasi tersebut yaitu, menjatuhkan rezim Saddam Hussein, melucuti Irak dari senjata pemusnah massal dan memerdekakan rakyat Irak dari rezim otoriter Saddam Hussein.

Konteks internasional

Invasi Inggris ke Mesir tahun 1956

Inggris tidak mendapatkan dukungan dan tidak membentuk aliansi dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap

Terusan Suez tidak pernah mendukung invasi militer sebagai solusi untuk menyelesaikan krisis yang ada dan lebih memilih diplomasi sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Amerika Serikat kemudian juga menjual poundsterling miliknya sehingga menyebabkan nilai tukar mata uang Inggris tersebut menurun. Ditambah lagi, Amerika Serikat melalui PBB juga melarang IMF untuk memberikan pinjaman dana kepada Inggris jika Inggris tidak segera menarik mundur pasukannya dari Mesir. Inggris kemudian menuruti permintaan tersebut dikarenakan adanya kemungkinan krisis ekonomi yang semakin besar jika invasi terus berlanjut dan tekanan terus diberikan.

Invasi Inggris ke Irak tahun 2003

Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1441 sebagai landasan dilaksanakannya invasi. Invasi militer tersebut juga mendapatkan dukungan dari dan sejalan dengan kepentingan negara-negara lain seperti Australia, Spanyol dan Polandia.

PERBANDINGAN KEBIJAKAN INVASI MILITER INGGRIS KE MESIR DAN IRAK

Jika diilustrasikan dengan tabel, maka perbandingan kedua kebijakan tersebut adalah sebagai mana tabel 1 berikut. Selain mengilustrasikan perbandingan, tabel 1 juga menguraikan bagaimana faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas seperti kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional mempengaruhi kegagalan invasi militer Inggris ke Mesir tahun 1956 untuk mencapai tujuan yang ditentukan serta berhasilnya kebijakan invasi militer Inggris ke Irak pada tahun 2003 dalam mencapai tujuan yang ditentukan.

Tabel 1

Perbandingan Kebijakan Invasi Militer Inggris ke Mesir (1956) dan Irak (2003)

	Mesir (1956)	Irak (2003)
Pengambil keputusan	Anthony Eden	Tony Blair
Politik dalam negeri	Mendapatkan perlawanan dari kubu oposisi di parlemen dan tak lama kemudian juga mendapat perlawanan dari kabinet	Mendapatkan persetujuan dari parlemen
Kondisi ekonomi dan militer	Kondisi ekonomi, tidak stabil karena memiliki rasio hutang negara yang tinggi; kondisi militer, kekurangan personel serta perlengkapan dan tidak ada aliansi dengan Amerika Serikat sebagai negara <i>super power</i> pasca Perang Dunia II, aliansi yang ada dengan Perancis terbukti tidak cukup kuat dikarenakan kedua negara hanya bisa menduduki sebagian kecil wilayah di sekitar Terusan Suez tanpa merebut kembali Terusan Suez seperti yang direncanakan	Kondisi ekonomi, stabil; kondisi militer, jumlah personel mencukupi karena pasukan militer sedang tidak dikerahkan untuk mengatasi konflik lain selain di Irak dan ada aliansi yang kuat dengan Amerika Serikat, Australia dan Polandia
Konteks internasional	Tidak mendapatkan dukungan dari PBB, Amerika Serikat serta negara-negara persemakmuran	Sejalan negara-negara lain seperti, Amerika Serikat, Australia, Polandia dan lain lain yang memiliki kepentingan yang sama.

KESIMPULAN

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa Inggris gagal dalam invasi militernya ke Mesir dikarenakan kondisi militernya yang saat itu sedang kekurangan personel dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk invasi. Komitmennya pada Perang Dingin mengharuskan Inggris untuk menempatkan pasukan militer di beberapa wilayah seperti Eropa, Atlantik Utara dan Korea. Ketika invasi militer ke Mesir hendak dilakukan, Inggris kesulitan untuk mengumpulkan jumlah personel yang diinginkan. Selain itu, kondisi ekonomi Inggris masih digolongkan kedalam ekonomi pasca perang dimana rasio hutang negara terhadap GDP masih cukup tinggi dan menyebabkan ekonomi Inggris kurang stabil. Saat invasi militer kemudian dijalankan dan bertentangan dengan kondisi politik domestik dan kehendak dunia internasional, Inggris mulai mendapatkan tekanan. Dari dalam negeri tekanan tersebut berasal dari kubu oposisi di parlemen sedangkan dari luar negeri, tekanan tersebut berasal dari Amerika Serikat serta PBB. Amerika Serikat kemudian memanfaatkan kondisi ekonomi Inggris yang rapuh untuk melarang IMF memberikan pinjaman dana kepada Inggris kecuali Inggris menarik mundur pasukannya dari Mesir. Ketika akhirnya poundsterling mengalami penurunan nilai tukar dan Inggris membutuhkan pinjaman dana dari IMF, Inggris kemudian terpaksa harus menarik mundur pasukan militernya dari Mesir tanpa bisa mencapai tujuan yang diharapkan dari invasi tersebut.

Lain halnya dengan kebijakan invasi militer Inggris ke Irak tahun 2003, kondisi ekonomi Inggris saat itu sudah stabil. Perdana Menteri Tony Blair berhasil membawa Inggris sebagai salah satu negara pemimpin di Benua Eropa. Jumlah personel militer yang dimiliki juga mencukupi karena pada tahun 2003, Inggris tidak memiliki komitmen apapun untuk menempatkan pasukannya di wilayah tertentu. Meskipun opini publik menentang kebijakan invasi militer ini, Perdana Menteri Blair berhasil mendapatkan dukungan dari parlemen. Selain itu dalam konteks internasional, Inggris melakukan invasi militernya ke Irak bersama dengan negara-

negara lain yang setuju akan perlunya invasi militer atas Irak seperti, Amerika Serikat, Australia dan Polandia.

Dari ketiga indikator diatas, konteks internasional merupakan hal yang paling penting bagi keberhasilan kebijakan luar negeri suatu negara khususnya jika kebijakan tersebut adalah invasi militer. PBB sebagai organisasi internasional yang salah satu tujuannya adalah menjaga keamanan dan perdamaian internasional memiliki kemampuan untuk menekan serta memberikan sanksi bagi negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan tercapainya tujuan tersebut. Sejak berdirinya, PBB telah membantu menyelesaikan sejumlah konflik internasional melalui Dewan Keamanan. Ketika konflik bersenjata terjadi, langkah pertama yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB adalah mengeluarkan perintah untuk melakukan gencatan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat. Jika perintah tersebut terbukti kurang efektif maka Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan sanksi berupa embargo ekonomi dan perdagangan, embargo persenjataan, *travel ban*, pemutusan hubungan diplomatik serta pembatasan finansial dan komoditas tertentu kepada sebuah negara.

Sanksi ini tentu dapat merugikan bagi sebuah negara karena bagaimanapun negara tidak bisa berjalan sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain dalam mencapai dan memenuhi kebutuhannya. Mau tidak mau, sebuah negara yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata dan membuat dirinya tidak sejalan dengan tujuan dari didirikannya PBB harus tunduk kepada permintaan Dewan Keamanan jika tidak mau banyak dirugikan. Hal seperti ini dapat dilihat dari kasus Inggris yang melakukan invasi militer ke Mesir pada tahun 1956 dimana invasi tersebut tidak mendapatkan dukungan dari PBB. Dewan Keamanan PBB kemudian memberikan tekanan kepada Inggris dengan melarang IMF untuk memberikan pinjaman dana kepada Inggris kecuali Inggris menghentikan invasinya ke Mesir. Inggris yang saat itu sangat membutuhkan pinjaman dana tersebut dan sedang menghadapi kemungkinan besar terjadinya krisis ekonomi karena nilai poundsterling yang terus

turun akhirnya setuju untuk menaati permintaan Dewan Keamanan PBB dan menarik mundur pasukannya dari Mesir.

Referensi

BUKU

Blair, T. (2010). *A Journey*. London: Hutchinson.

Coplin, W. D., & Marbun, M. (1992). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.

Pearson, J. (2003). *Sir Anthony Eden and The Suez Crisis: Reluctant Gamble*. New York: Palgrave Macmillan.

Sanders, D. (1989). *Losing an Empire, Finding a Role: British Foreign Policy Since 1945*. New York: St Martin Press Inc.

Varble, D. (2003). *The Suez Crisis*. Oxford: Osprey Publishing Limited.

JURNAL

Ashton, N. (1996, Juli 24). Why Did We Fail in Suez? *The Independent*, p. 12.

Kennedy-Pipe, C., & Vickers, R. (2007). 'Blowback' for Britain?: Blair, Bush and The War in Iraq. *Review of International Studies* 33, 205-221.

Kramer, S. P. (2003). The Blair Moment. *The Wilson Quarterly*, 72-84.

Mahmood, K. (1962). British Public Opinion and Suez. *Pakistan Horizon*, 204-220.

Seymour-Ure, C. (1984). British 'War Cabinets' in Limited Wars: Korea, Suez and Falklands. *Public Administration*, 181-200.

Sharp, J. M. (2004). Tony Blair, Iraq and the Special Relationship: Poodle or Partner? *International Journal Toronto Vol. 59*, 59-86.

Stuchlik, J. (2004). Public Opinion and Foreign Policy Discourse in the United Kingdom and France during the Iraq Crisis (September 2002-March 2003). *Perspectives*, 3-35.

Suter, K. (2004, November 25). When Britain Invaded Egypt and Riled the US. *The Daily Telegraph*, p. 61.

REPORTS

Commision, E. (2003). *European Economy*. Belgium: Directorate-General for Economic and Financial Affairs

WEBSITE

Gaitskell, H. (1956, Oktober 31). *Common Sitting: Middle East (Situation)*. Retrieved from api.parliament.uk: <https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1956/oct/31/middle-east-situation>

MORI, I. (2002, September 26). *Possible War with Iraq - the Public View*. Retrieved from ipsos.com: <https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/possible-war-iraq-publics-view>

MORI, I. (2003, Maret 21). *Iraq, The Last Pre-War Polls*. Retrieved from ipsos.com: <https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/iraq-last-pre-war-polls>

MORI, I. (2003, Maret 5). *War with Iraq*. Retrieved from ipsos.com: <https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/war-iraq>

National Statistic, O. o., & Richards, C. (2018, Desember 21). *Gross Domestic Product Chained Volume Measured*. Retrieved from ons.gov.uk: <https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/abmi/qna>

National Statistic, O. o., & Richards, C. (2018, November 9). *Gross Domestic Product: Year on Year growth: CVM SA%*. Retrieved from ons.gov.uk:

<https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihyp/pn2>

Pettinger, T. (2016, April 25). *UK Economic History*. Retrieved from economicshelp.org: <https://www.economicshelp.org/blog/2135/economics/uk-economic-history/>

Pettinger, T. (2017, Januari 28). *UK post-war economic boom and reduction in debt*. Retrieved from economicshelp.org: <https://www.economicshelp.org/blog/11697/debt/post-war-boom/>